PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. Mastrip No.7 Nganjuk Kode Pos 64419
Telp./Fax (0358) 330055e-mail : dprkppnganjuk@gmail.com

Nganjuk, 14 Juni 2024

Kepada :

Yth. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Nganjuk
di

N G A N J U K

SURAT PENGANTAR

Nomor : 600/1107/411.315/2024

No	Jenis Surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Triwulan II Tahun 2024, Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat untuk mencukupi permintaan surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, Nomor 050/1298/411.000/2024, Tanggal 04 Juni 2024

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Nganjuk

AGUS FRIHANNEDY, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640901 198703 1 013

Paraf Hierarkis			
No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Dinas / Badan		14/6-24
2.	Kasubbag		14/6/24

EVALUASI RENJA
TRIBULAN II TAHUN 2024



DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NGANJUK

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan Evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sampai Triwulan II melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.

Evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dimasa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan Evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah menilai capaian target kinerja, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

Tujuan dilaksanakan Evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja.

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disajikan dalam sistematika, sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan;
2. BAB II Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024;
3. BAB III Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja;
4. BAB IV Penutup; dan
5. Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria, sebagai berikut :

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

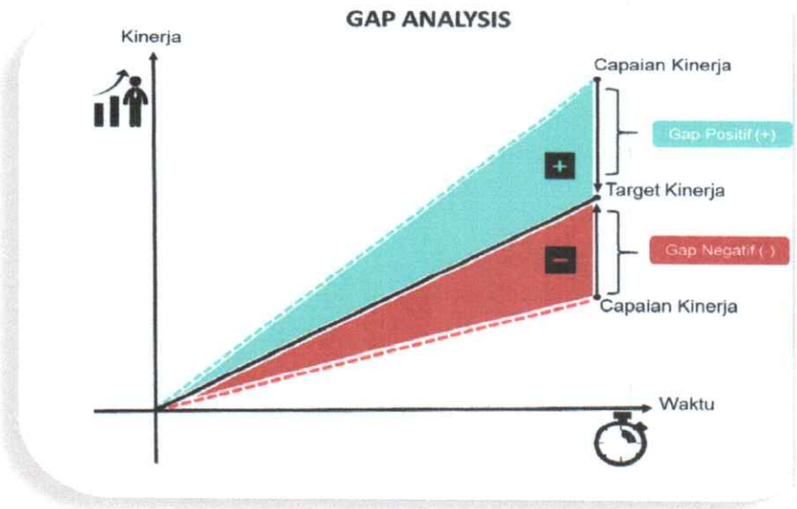
Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai, sebagai berikut :

1. Hasil sangat tinggi dan tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.

2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut :

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



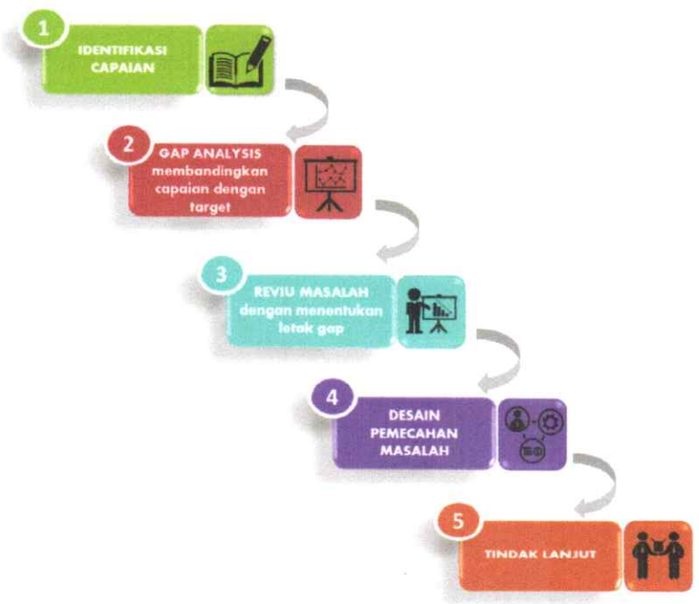
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk :

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis* :

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif.
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat, maka Evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagainya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024 disajikan sebagaimana tabel berikut :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2024 (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1	**Tujuan :** Meningkatnya akses hunian yang layak	Persentase Rumah Layak Huni	96,94%	96,71%	99,76%
2	**Sasaran :** Meningkatkan Akses Hunian yang layak	Persentase Rumah Layak Huni	96,94%	96,71%	99,76%
		Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	28,23%	17,09%	60,53%

Pencapaian tujuan/sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja tujuan/sasaran. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja tujuan/sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi indikator tujuan meningkatnya akses hunian yang layak terealisasi sebesar 96,71% dari target yang telah ditetapkan sebesar 96,94% dengan tingkat capaian sebesar 99,76%. Dengan rumus perhitungan yang didapat yaitu jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah total rumah di kali 100%.

2. Realisasi indikator sasaran Persentase Rumah Layak Huni terealisasi sebesar 96,71% dari target yang telah ditetapkan sebesar 96,94% dengan tingkat capaian sebesar 99,76%. Dengan rumus perhitungan yang didapat yaitu jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah total rumah di kali 100%.

3. Realisasi indikator sasaran Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh terealisasi sebesar 17,09% dari target yang telah ditetapkan sebesar 28,23% dengan tingkat capaian sebesar 60,53%. Dengan rumus perhitungan yang didapat yaitu Luas Total Kawasan Kumuh Dalam SK dikurangi Luas Tahun n dibagi dengan Luas Total Kawasan Kumuh Dalam SK dikali 100%.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas PRKPP	84 (A)	77,50 (BB)	92,26%

Dalam pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja "Nilai SAKIP Dinas PRKPP" yang ditargetkan pada Tahun 2024, sebesar 84 (A) pada Tribulan II realisasi nilai 77,50 (BB). Beberapa komponen penilaian SAKIP, sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja, bobot 30%, nilai hasil evaluasi 23,70
2. Pengukuran kinerja, bobot 30%, nilai hasil evaluasi 22,20
3. Pelaporan kinerja, bobot 15%, nilai hasil evaluasi 11,10
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal, bobot 25%, nilai hasil evaluasi 20,50

Sehingga dari bobot keseluruhan 100% dengan nilai SAKIP sebesar 84 (A), realisasi Dinas PRKPP mendapatkan nilai hasil evaluasi sebesar 77,50 (BB), dengan capaian sebesar 92,26%.

Adapun Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari kegiatan, antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan hasil jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sebanyak 8 dokumen dan keluaran jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 4 dokumen, antara lain :
   a. Dokumen Perencanaan terdiri dari :
      1). Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
      2). Dokumen Renstra Perangkat Daerah;
      3). Dokumen Renja Perangkat Daerah;
      4). Dokumen Rencana Aksi Perangkat Daerah.
   b. Dokumen Penyusunan RKA SKPD
   c. Dokumen Penyusunan RKA-Perubahan SKPD
   d. Dokumen Penyusunan DPA SKPD
   e. Dokumen Penyusunan DPA-Perubahan SKPD
   f. Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, terdiri dari :
      1). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

2). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);

3). Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);

4). Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan;

5). Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

g. Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, dengan keluaran Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun yaitu sebanyak 6 dokumen, laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD. Adapun realisasi sampai dengan triwulan II sebagai berikut :
   a. Tersusunnya laporan keuangan bulanan untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni Tahun 2024;
   b. Tersusunnya laporan keuangan triwulan I dan laporan keuangan triwulan II Tahun 2024;
   c. Tersusunnya laporan keuangan semester I Tahun 2024.

3. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan keluaran jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 50 orang. Adapun kondisi riil sampai dengan triwulan II jumlah pegawai PNS sebanyak 31 orang dan PPPK sebanyak 4 orang, hal ini disebabkan karena mutase pegawai. Sedangkan pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan berupa kegiatan *capacity building* sebanyak 35 orang

4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan hasil jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang dipenuhi sebanyak 7 dokumen. Adapun keluaran dan realisasi sampai dengan triwulan II, sebagai berikut :
   a. Keluaran jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 6 paket, dengan realisasi sebanyak 6 kali penyerapan dalam 1 tahun;
   b. Keluaran jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 3 paket, terdiri dari Alat Tulis Kantor (ATK), Bahan Kebersihan dan Natura-Pakan lainnya. Adapun realisasi penyerapan tiap bulan sekali;
   c. Keluaran jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 1 paket. Adapun realisasi penyerapan tiap bulan sekali;
   d. Keluaran jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan sebanyak 4 dokumen. Adapun realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 1 dokumen berupa surat kabar;

e. Keluaran jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 3 laporan, terdiri dari snack harian, makan dan minum rapat serta makan dan minum jamuan tamu;

f. Keluaran jumlah laporan peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 1 laporan. Adapun realisasi sampai dengan triwulan II yaitu pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah pejabat eselon II dan eselon III maupun pelaksana;

g. Keluaran jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD sebanyak 3 dokumen. Adapun realisasi sampai dengan triwulan II belum ada penyerapan.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan hasil jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan sebanyak 36 unit. Adapun keluaran dan realisasi sampai dengan triwulan II, sebagai berikut :

   a. Keluaran jumlah paket mebel yang disediakan sebanyak 30 unit, dengan realisasi sampai dengan triwulan II yakni 5 unit rak arsip dan 25 unit kursi staf;

   b. Keluaran jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan sebanyak 6 unit, berdasarkan kode rekening belanja modal sebagai berikut :

      1). Belanja modal peralatan dan mesin;
      2). Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
      3). Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
      4). Belanja modal komputer;
      5). Belanja modal peralatan komputer;
      6). Belanja modal alat pengeboran.

      Adapun realisasi sampai dengan triwulan II yakni :

      1). Belanja modal peralatan dan mesin, pada triwulan II belum ada realisasi;
      2). Belanja modal alat bengkel dan alat ukur, pada triwulan II belum ada realisasi;
      3). Belanja modal alat kantor dan rumah tangga, pada triwulan II terdapat realisasi berupa deteksi asap 1 unit;
      4). Belanja modal komputer, pada triwulan II terdapat realisasi berupa laptop 3 unit dan tablet 4 unit;
      5). Belanja modal peralatan komputer, pada triwulan II terdapat realisasi berupa printer 4 unit.

6. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan hasil jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang

disusun sebanyak 12 laporan, dengan keluaran jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan sebanyak 12 laporan. Adapun realisasi sampai dengan triwulan II, sebanyak 6 laporan.

7. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan hasil jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang dipelihara sebanyak 23 unit. Adapun keluaran dan realisasi sampai dengan triwulan II, sebagai berikut :
   a. Keluaran jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 1 unit, tidak ada realisasi pemeliharaan;
   b. Keluaran jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 15 Unit, dengan realisasi sampai dengan triwulan II yakni kendaraan roda empat yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 3 unit dan kendaraan roda dua yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 6 unit;
   c. Keluaran jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 5 unit, berdasarkan kode rekening sebagai berikut :
      1). Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga–alat rumah tangga–mebel, pada triwulan II terdapat realisasi berupa pemeliharaan mebel sebanyak 30 unit;
      2). Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga–alat rumah tangga –alat pendingin, pada triwulan II terdapat realisasi berupa pemeliharaan AC sebanyak 6 unit;
      3). Belanja pemeliharaan komputer–komputer unit–personal komputer, pada triwulan II terdapat realisasi berupa pemeliharaan laptop sebanyak 3 unit, komputer sebanyak 3 unit;
      4). Belanja pemeliharaan komputer–peralatan komputer–peralatan personal komputer, pada triwulan II terdapat realisasi berupa pemeliharaan printer sebanyak 4 unit.
   d. Keluaran jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 2 unit, dengan realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 1 unit.

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase backlog rumah	8%	0,12%	1,5%

Dalam pelaksanaan program pengembangan perumahan dengan indikator kinerja persentase backlog rumah yang ditargetkan pada Tahun 2024, sebesar 8% pada triwulan II telah terealisasi sebesar 0,12%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 1,5%. Pencapaian program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota dengan hasil jumlah dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota sebanyak 2 dokumen, sedangkan keluaran jumlah dokumen data rumah yang terkena bencana kabupaten/kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah sebanyak 1 dokumen;
2. Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota, dengan hasil jumlah rumah beserta PSU korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dibangun dan direhabilitasi sebanyak 150 unit, dan keluaran jumlah rumah korban bencana kabupaten/kota yang terehabilitasi sebanyak 25 unit rumah;
3. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus dengan hasil jumlah laporan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus sebanyak 1 laporan, dan keluaran jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus sebanyak 1 dokumen;
4. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dengan hasil jumlah rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan sebanyak 10 dokumen, dan keluaran jumlah dokumen kesepakatan dengan pengembang/pelaku pembangunan rumah untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik sebanyak 10 dokumen;
5. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) dengan hasil jumlah laporan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB) sebanyak 1 laporan, dan keluaran jumlah laporan hasil

koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB) sebanyak 1 laporan.

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditingkatkan	14,11%	3,50%	24,80%

Dalam pelaksanaan program kawasan permukiman dengan indikator kinerja persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditingkatkan yang ditargetkan pada Tahun 2024, sebesar 14,11% pada Tribulan II telah terealisasi sebesar 3,50%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 24,80%. Pencapaian program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dengan hasil jumlah dokumen hasil penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha sebanyak 1 dokumen, dan jumlah laporan hasil penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman sebanyak 1 laporan, sedangkan keluaran jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman sebanyak 1 laporan;
2. Kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, dengan hasil jumlah dokumen hasil penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha sebanyak 1 dokumen, dan keluaran jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/tereview/terlegalisasi sebanyak 3 dokumen;
3. Kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan hasil jumlah lokasi kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan sebanyak 30 lokasi, dan keluaran jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki sebanyak 50 unit rumah.

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha	6,73%	3,03%	45,02%

Dalam pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman kumuh dengan indikator kinerja persentase unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditargetkan pada Tahun 2024, sebesar 6,73% pada Tribulan II telah terealisasi sebesar 3,03% maka diperoleh persentase capaian sebesar 45,02%. Pencapaian program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota dengan hasil jumlah unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar Kawasan kumuh dibawah 10 Ha sebanyak 450 unit rumah dan keluaran jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki sebanyak 450 unit rumah.

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang terfasilitasi PSU	5%	0,33%	6,6%

Dalam pelaksanaan program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dengan indikator kinerja persentase perumahan yang terfasilitasi PSU yang ditargetkan pada Tahun 2024, sebanyak 5%, dengan realisasi pada Tribulan II sebesar 0,33%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 6,6%. Pencapaian program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan urusan penyelenggaraan PSU perumahan dengan hasil jumlah lokasi perumahan yang terfasilitasi PSU sebanyak 20 lokasi dan keluaran jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan sebanyak 1

dokumen. Adapun sampai dengan Triwulan II jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian sebanyak 6 (enam) lokasi, diantaranya :

a. Pembangunan PSU Drainase di Perumahan GANUNG ASRI;
b. Pembangunan PSU Jalan Menuju Perumahan NUANSA KAPAS ASRI;
c. Pembangunan PSU Jalan Menuju Perumahan TAQIYA LAND;
d. Pembangunan PSU Jalan Paving di Perumahan VILLA CANDI MAS;
e. Pembangunan RPTRA di Perumahan Green Werungotok Residence;
f. Pembangunan RPTRA di Perumahan Griya Mastrip Regency.

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
6	Program Penatagunaan Tanah	Presentase Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	100%	7,22%	7,22%

Dalam pelaksanaan program penatagunaan tanah dengan indikator kinerja presentase permasalahan pertanahan yang difasilitasi yang ditargetkan pada Tahun 2024, sebesar 100% pada Tribulan II telah terealisasi sebesar 7,22%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 7,22%. Pencapaian program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota dengan keluaran jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah sebanyak 1 (satu) dokumen dan keluaran jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) laporan. Realisasi keuangan pada program penatagunaan tanah masih tergolong sangat rendah. Penyebab proporsi penyerapan anggaran masih rendah, diantaranya :
   a. Jasa konsultansi tata batas Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) masih tahap proses;
   b. Surat permohonan Bupati Nganjuk terkait verifikasi dan validasi lapangan atas sisa usulan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) oleh Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih belum jelas

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	**Tujuan :** Meningkatnya akses hunian yang layak	Terbentuknya Forum dan Pokja PKP, sehingga diharapkan mampu menjembatani penyampaian permasalahan yang timbul pada Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk kepada para pengambil kebijakan dalam pemenuhan akses hunian yang layak	Permasalahan perumahan dan permukiman belum menjadi atensi dan isu strategis dari para pengambil kebijakan dan stakeholder terkait
2	**Sasaran :** Meningkatnya akses hunian yang layak	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dibentuk untuk menangani masalah perumahan dan permukiman	Terbatasnya alokasi anggaran dan peranserta masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung program Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni di Kabupaten Nganjuk

III.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut :

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aplikasi SIPD merupakan salah satu aplikasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga dengan diterapkannya aplikasi SIPD tersebut mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kinerja perangkat daerah sedikit terhambat ketika sedang mengimplementasikan kegiatan yang menggunakan aplikasi SIPD, sementara aplikasi sedang error
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Aplikasi SIPD merupakan salah satu aplikasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga dengan diterapkannya aplikasi SIPD tersebut mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tidak ada hambatan, namun terkadang muncul kendala SIPD error pada saat digunakan, sehingga target ketuntasan tugas menjadi mundur
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Aplikasi SIPD merupakan salah satu aplikasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga dengan diterapkannya aplikasi SIPD tersebut mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Sinergitas terjalin secara harmonis pada Dinas PRKPP, sehingga koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD tidak ada hambatan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Aplikasi SIPD merupakan salah satu aplikasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga dengan diterapkannya aplikasi SIPD tersebut mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD tidak ada hambatan dan berjalan lancar
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Aplikasi SIPD merupakan salah satu aplikasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga dengan diterapkannya aplikasi SIPD tersebut mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD tidak ada hambatan dan berjalan sesuai target
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Aplikasi SIPD merupakan salah satu aplikasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga dengan diterapkannya aplikasi SIPD tersebut mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD tidak ada hambatan

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Aplikasi SIPD merupakan salah satu aplikasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga dengan diterapkannya aplikasi SIPD tersebut mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua bidang pada Dinas PRKPP Kab. Nganjuk saling sinergi dalam koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, sehingga tidak muncul permasalahan dalam pelaksanaannya
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aplikasi SIPD merupakan salah satu aplikasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga dengan diterapkannya aplikasi SIPD tersebut mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tidak ada hambatan dalam melaksanakan evaluasi kinerja perangkat daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN bersifat rutin, sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman sebelumnya	Koordinasi dengan BPKAD berjalan lancar, sehingga tidak ada hambatan dalam penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Evaluasi realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan koordinasi antar pihak berjalan lancar, sehingga menjadi salah satu faktor pendorong tersusunnya laporan keuangan akhir tahun pada Dinas PRKPP	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun pada Dinas PRKPP menunggu hasil validasi dari BPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Evaluasi realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan koordinasi antar pihak berjalan lancar, sehingga menjadi salah satu faktor pendorong tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran pada DinasPRKPP	Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran pada Dinas PRKPP menunggu hasil validasi dari BPKAD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyelenggaraan kegiatan *Carakter Building* pada Dinas PRKPP menjadi salah satu pendidikan dan pelatihan non formal untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan semua pegawai, sehingga diharapkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas PRKPP memiliki motivasi untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan secara formal	Kurangnya antusias dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mengikuti program pendidikan dan pelatihan.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik yang harus disediakan sesuai dengan kebutuhan penerangan bangunan kantor	Tidak ada hambatan dalam penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya aplikasi LPSE sebagai aplikasi pengadaan barang dan jasa di Pemda Nganjuk, sehingga mempermudah penyediaan bahan logistik kantor	Koordinasi dengan penyedia jasa dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemda Nganjuk berjalan baik, sehingga kebutuhan logistik kantor tercukupi
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Koordinasi dengan penyedia jasa berjalan baik, sehingga kebutuhan barang cetakan dan penggandaan bisa terlaksana	Tidak ada hambatan dalam penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Koordinasi dengan penyedia jasa berjalan baik, sehingga kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tercukupi	Tidak ada hambatan dalam penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya aplikasi LPSE sebagai aplikasi pengadaan barang dan jasa di Pemda Nganjuk, sehingga mempermudah penyediaan kebutuhan untuk fasilitasi kunjungan tamu	Koordinasi dengan penyedia jasa dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemda Nganjuk berjalan baik, sehingga penyediaan kebutuhan untuk fasilitasi kunjungan tamu tercukupi
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD bersifat rutin dan berulang, sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pelaksanaan sebelumnya	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD berjalan lancar
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya aplikasi srikandi sebagai aplikasi surat menyurat di Pemda Nganjuk, sehingga mempermudah penatausahaan arsip dinamis pada Dinas PRKPP	Pada situasi yang bersifat penting/segera, kemudian terjadi gangguang/error pada aplikasi srikandi, sehingga berdampak pada proses surat menyurat tidak berjalan lancar
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Mebel	Tersedianya aplikasi LPSE sebagai aplikasi pengadaan barang dan jasa di Pemda Nganjuk, sehingga mempermudah pengadaan mebel pada Dinas PRKPP	Koordinasi dengan penyedia jasa dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemda Nganjuk berjalan baik, sehingga pengadaan mebel pada Dinas PRKPP tercukupi
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya aplikasi LPSE sebagai aplikasi pengadaan barang dan jasa di Pemda Nganjuk, sehingga mempermudah pengadaan peralatan dan mesin lainnya pada Dinas PRKPP	Koordinasi dengan penyedia jasa dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemda Nganjuk berjalan baik, sehingga pengadaan peralatan dan mesin lainnya pada Dinas PRKPP tercukupi
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Koordinasi dengan penyedia jasa berjalan lancar, sehingga penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Dinas PRKPP terlaksana dengan baik	Kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Dinas PRKPP tercukupi dan tidak ada kendala dalam penyediaannya

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan bersifat rutin, sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman sebelumnya	Tidak ada hambatan dalam penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan bersifat rutin, sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman sebelumnya	Tidak ada hambatan dalam penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas opersional atau lapangan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya bersifat rutin, sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman sebelumnya	Tidak ada hambatan dalam pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya bersifat rutin, sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman sebelumnya	Kerusakan gedung tidak bisa diprediksi sebelumnya, namun tetap dianggarkan untuk kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, sehingga tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**		
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Diperlukan assessment rumah korban bencana untuk menentukan besaran bantuan	Adanya Perbup BTT baru yang mensyaratkan review APIP, memerlukan waktu yang lama
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Diperlukan dokumen perencanaan yang komprehensif terkait Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten	Proses pelaksanaan pekerjaan oleh Konsultan masih berjalan, sehingga hasil belum bisa diperoleh
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Diperlukan dokumen perencanaan yang komprehensif terkait Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten	Proses pelaksanaan pekerjaan oleh Konsultan masih berjalan, sehingga hasil belum bisa diperoleh
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	- (Dalam proses pemberian bantuan difasilitasi dengan	- (Dalam proses pemberian bantuan difasilitasi dengan

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		anggaran Belanja Tidak Terduga, sehingga anggaran subkegiatan akan dihilangkan)	anggaran Belanja Tidak Terduga, sehingga anggaran subkegiatan akan dihilangkan)
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	- (Dalam proses pemberian bantuan difasilitasi dengan anggaran Belanja Tidak Terduga, sehingga anggaran subkegiatan akan dihilangkan)	- (Dalam proses pemberian bantuan difasilitasi dengan anggaran Belanja Tidak Terduga, sehingga anggaran subkegiatan akan dihilangkan)
	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pemeliharaan PSU pada Rumah Khusus	Anggaran tidak memadai sehingga akan diusulkan penambahan anggaran
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	- (Anggaran subkegiatan dihilangkan untuk efisiensi pagu OPD)	- (Anggaran subkegiatan dihilangkan untuk efisiensi pagu OPD)
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Adanya Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur sewa/retribusi	Masyarakat yang tinggal di Rumah Khusus adalah masyarakat berpenghasilan rendah
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya aplikasi sebagai inovasi percepatan Pelayanan Rekomendasi Siteplan dan Penyerahan PSU Perumahan Formal	Antusias dari pemohon ijin rendah
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Diperlukan penyusunan dokumen RP3KP	Proses pelaksanaan pekerjaan oleh Konsultan masih berjalan, sehingga hasil belum bisa diperoleh
	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Agar masyarakat dapat memproses PBG Hunian dan SLF	Persyaratan dalam memproses PBG Hunian dan SLF yang komplek
3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**		
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Diperlukan koordinasi dan sinkronisasi antar stakholder yang terlibat dalam pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, sehingga jelas pembagian kewenangan dan fokus penanganannya	Koordinasi direncanakan pelaksanaannya pada akhir semester I terkait dengan bentuk intervensi penanganan dan hasil perhitungan kinerja pengurangan luasan kawasan kumuh sementara
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman		

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Diperlukan dokumen perencanaan yang komperehensif terkait penataan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman sehingga pembangunan dapat terarah	Proses pelaksanaan pekerjaan oleh Konsultan masih berjalan, sehingga hasil kegiatan belum bisa diperoleh
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar, sehingga pemerintah (daerah) wajib mendukung ketersediaan rumah layak huni melalui stimulan bagi masyarakat untuk perbaikan maupun pembangunannya	Adanya kepercayaan setempat terkait bulan baik/buruk, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak maksimal, disamping keterbatasan swadaya oleh penerima bantuan yang menyebabkan keterlambatan pembangunan di beberapa rumah
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar, sehingga pemerintah (daerah) wajib mendukung ketersediaan rumah layak huni melalui stimulan bagi masyarakat untuk perbaikan maupun pembangunannya	Adanya kepercayaan setempat terkait bulan baik/buruk, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak maksimal, disamping keterbatasan swadaya oleh penerima bantuan yang menyebabkan keterlambatan pembangunan di beberapa rumah
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Salah satu strategi pengurangan kawasan kumuh adalah dengan menyediakan fasilitas infrastruktur di perumahan dan permukiman kumuh berupa pembangunan jalan/drainase lingkungan sesuai kewenangan daerah	Belum selesainya pelaksanaan pembangunan fisik, sehingga penyerapan anggaran belum maksimal
4	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**		
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar, sehingga pemerintah (daerah) wajib mendukung ketersediaan rumah layak huni melalui stimulan bagi masyarakat untuk perbaikan maupun pembangunannya	Adanya kepercayaan setempat terkait bulan baik/buruk, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak maksimal, disamping keterbatasan swadaya oleh penerima bantuan yang menyebabkan keterlambatan pembangunan di beberapa rumah
5	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**		
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Pembangunan PSU pada Rumah Khusus bagi Perumahan formal	Belum selesainya perencanaan kegiatan fisik, sehingga

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			penyedia jasa konstruksi belum bisa diproses pemilihannya
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan PSU pada Rumah Khusus bagi Perumahan formal	Belum selesainya perencanaan kegiatan fisik, sehingga penyedia jasa konstruksi belum bisa diproses pemilihannya
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Koordinasi kegiatan fisik pada PSU Perumahan Formal
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Proses serah terima PSU Perumahan Formal dari Pengembang	Belum selesainya persyaratan yang harus dipenuhi dari Pihak pengembang
6	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**		
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Agar masyarakat yang menempati tanah relokasi Bendungan Semantok dapat segera memiliki alas hak yang sah, maka TMKH dapat menjadi kegiatan prioritas Kabupaten	Belum siapnya dokumen perencanaan kegiatan, sehingga penyedia jasa konsultansi tata batas belum bisa diproses pemilihannya
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Agar masyarakat yang menempati tanah dalam kawasan hutan dapat segera memiliki alas hak yang sah, maka PPTPKH dapat menjadi kegiatan prioritas Kabupaten	Belum jelasnya tindaklanjut atas surat permohonan Bupati Nganjuk terkait verifikasi dan validasi lapangan atas sisa usulan PPTPKH oleh KLHK, sehingga anggaran kegiatan yang tersedia belum bisa dioptimalkan

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Melalui Evaluasi Rencana Kerja Tribulan II Tahun Anggaran 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk diharapkan dapat memberikan gambaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapainya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dalam pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dang fungsi Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari hambatan dan kendala, oleh karena itu perlu antisipasi sejak dini untuk upaya-upaya perbaikan dan penyesuaian melalui evaluasi secara berkala setiap bulannya secara intens dan konsisten serta berkoordinasi antar bagian dan sekretaris Dinas PRKPP dan Pimpinan Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk selaku pihak yang dilayani dan yang melayaninya.

Akhirnya melalui laporan evaluasi Rencana Kerja Tribulan II Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan adanya perbaikan dan penyesuaian pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tribulan selanjutnya.

IV.2. Tindak Lanjut

1. Perencanaan kinerja :
   a. Tersusunnya rencana aksi yang merinci langkah-langkah konkret/tindakan nyata yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
   b. Telah meninjau setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung setiap indikator kinerja sasaran, hal ini untuk memperkuat efektivitas rencana aksi yang akan meningkatkan koherensi dan keselarasan dalam implementasi
2. Pengukuran kinerja :
   a. Telah melaksanakan pengukuran rencana aksi secara sistematis dan terarah melalui evaluasi berkala terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana aksi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengukuran rencana aksi untuk mendorong keterlibatan aktif dalam pencapaian tujuan

b. Laporan evaluasi kinerja internal setiap tribulan telah menyajikan capaian kinerja dan capaian anggaran untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi

3. Pelaporan kinerja :

a. Telah melakukan peninjauan ulang terhadap data dan proses pengukuran, pelaporan serta evaluasi lebih lanjut terhadap indikator yang digunakan guna memastikan akurasi informasi yang disajikan

Nganjuk, 14 Juni 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Nganjuk

Paraf Hierarkis			
No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Dinas / Badan		
2.	Kasubbag		14/6/24

AGUS FRIHANNEDY,S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640901 198703 1 013

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Nganjuk
Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang mengacu pada sasaran RKPD :

1. Persentase Rumah Layak Huni = 96,94%
2. Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh = 28,23%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Catatan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13 = 12/7		14 = 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																											
1	Meningkatkan Akses Hunian yang layak	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas PRKPP**	**86 (A)**	**24.962.399.882**	**79%**	**5.677.509.321**	**84 Nilai**	**7.347.668.350**		**552.604.522**	**77,50 Nilai**	**1.874.248.618**					**77,50 Nilai**	**2.426.853.140**	**92,26%**	**33,03%**	**77,50 Nilai**	**2.426.853.140**	**90,12%**	**9,72%**	**DPRKPP**	**Tidak Komulatif**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**24 dokumen**	**169.000.000**	**8 dokumen**	**37.463.000**	**8 dokumen**	**39.663.000**	**0 dokumen**	-	**4 dokumen**	**15.221.000**					**4 dokumen**	**15.221.000**	**50,00%**	**38,38%**	**4 dokumen**	**15.221.000**	**16,67%**	**9,01%**	**DPRKPP**	Komulatif
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	12 dokumen	22.000.000	4 dokumen	4.957.000	4 dokumen	4.950.000	0 dokumen	-	1 dokumen	825.000					1 dokumen	825.000	25,00%	16,67%	1 dokumen	825.000	8,33%	3,75%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	22.000.000	1 dokumen	4.986.000	1 dokumen	4.950.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-					0 dokumen	0	0,00%	0,00%	0 dokumen	0	0,00%	0,00%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen	22.000.000	1 dokumen	4.950.000	1 dokumen	4.950.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-					0 dokumen	0	0,00%	0,00%	0 dokumen	0	0,00%	0,00%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	22.000.000	1 dokumen	4.983.000	1 dokumen	4.950.000	1 dokumen	-	1 dokumen	4.934.000					1 dokumen	4.934.000	100,00%	99,68%	1 dokumen	4.934.000	33,33%	22,43%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 dokumen	22.000.000	1 dokumen	4.983.000	1 dokumen	4.950.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-					0 dokumen	0	0,00%	0,00%	0 dokumen	0	0,00%	0,00%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	37.000.000	2 laporan	12.604.000	2 laporan	9.913.000	0 laporan	-	1 laporan	5.412.000					1 laporan	5.412.000	50,00%	54,59%	1 laporan	5.412.000	16,67%	14,63%	DPRKPP	Komulatif

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Catatan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13 = 12/7		14 = 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	22.000.000	0 laporan	-	1 laporan	5.000.000	0 laporan	-	1 laporan	4.050.000					1 laporan	4.050.000	100,00%	81,00%	1 laporan	4.050.000	33,33%	18,41%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18 dokumen**	**20.895.070.000**	**6 Dokumen**	**4.295.470.444**	**6 Dokumen**	**5.773.813.000**	**0 Dokumen**	**442.461.924**	**4 dokumen**	**1.576.785.790**					**4 Dokumen**	**2.019.247.714**	**66,67%**	**34,97%**	**4 Dokumen**	**2.019.247.714**	**22,22%**	**9,66%**	**DPRKPP**	**Komulatif**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 orang/bulan	20.851.070.000	35 orang	4.285.579.444	50 orang/bulan	5.763.913.000	31 orang	442.461.924	35 orang	1.571.256.790					35 orang	2.013.718.714	62,00%	34,94%	35 orang	2.013.718.714	23,33%	9,66%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9 laporan	22.000.000	3 Laporan	4.926.000	3 Laporan	4.950.000	0 Laporan	-	3 Laporan	4.941.000					3 Laporan	4.941.000	100,00%	99,82%	3 Laporan	4.941.000	33,33%	22,46%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9 laporan	22.000.000	3 Laporan	4.965.000	3 Laporan	4.950.000	0 Laporan	-	1 laporan	588.000					1 laporan	588.000	33,33%	11,88%	1 laporan	588.000	11,11%	2,67%	DPRKPP	Komulatif
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi**	**150 Orang**	**237.000.000**	**35 orang**	**8.500.000**	**50 Dokumen**	**168.372.500**	**31 orang**	**1.225.000**	**35 orang**	**1.225.000**					**35 orang**	**2.450.000**	**70,00%**	**1,46%**	**35 orang**	**2.450.000**	**23,33%**	**1,03%**	**DPRKPP**	**Tidak Komulatif**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	200.000.000	0	-	2 Paket	145.072.500	0	-	0	-					0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	37.000.000	35 orang	8.500.000	50 orang	23.300.000	31 orang	1.225.000	35 orang	1.225.000					35 orang	2.450.000	62,00%	10,52%	35 orang	2.450.000	23,33%	6,62%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah**	**21 dokumen**	**1.003.000.000**	**3 paket**	**424.317.386**	**7 dokumen**	**370.990.850**	**1 dokumen**	**38.162.422**	**1 dokumen**	**49.704.295**					**2 Dokumen**	**87.866.717**	**28,57%**	**23,68%**	**2 Dokumen**	**87.866.717**	**9,52%**	**8,76%**	**DPRKPP**	**Komulatif**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 paket	22.000.000	6 paket	4.880.000	6 paket	4.917.500	1 paket	687.500	0 paket	-					1 paket	687.500	16,67%	13,98%	1 paket	687.500	5,56%	3,13%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 paket	310.000.000	3 paket	86.179.370	3 paket	147.642.450	3 paket	15.636.500	3 paket	19.639.450					3 paket	35.276.050	33,33%	23,89%	3 paket	35.276.050	33,33%	11,38%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	127.000.000	1 paket	38.947.750	1 paket	41.618.700	1 paket	1.494.250	1 paket	9.545.750					1 paket	11.040.000	100,00%	26,53%	1 paket	11.040.000	33,33%	8,69%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	28.000.000	3 dokumen	4.868.000	4 dokumen	5.300.000	1 dokumen	960.000	1 dokumen	976.000					2 dokumen	1.936.000	25,00%	36,53%	2 dokumen	1.936.000	16,67%	6,91%	DPRKPP	Komulatif
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	9 laporan	22.000.000	3 laporan	2.573.315	3 laporan	5.210.700	1 laporan	433.690	1 laporan	2.438.595					2 laporan	2.872.285	33,33%	55,12%	2 laporan	2.872.285	22,22%	13,06%	DPRKPP	Komulatif

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggu ngjawab	Catatan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13 = 12/7		14 = 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	472.000.000	9 laporan	232.048.901	1 laporan	161.301.500	1 laporan	18.950.382	1 laporan	17.104.500					1 laporan	36.054.882	100,00%	22,35%	1 laporan	36.054.882	33,33%	7,64%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9 dokumen	22.000.000	3 dokumen	54.820.050	3 dokumen	5.000.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	0,00%	0,00%	0 dokumen	0	0,00%	0,00%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**108 unit**	**674.000.000**	**20 unit**	**217.270.000**	**36 unit**	**235.967.200**	**0 unit**	**-**	**36 unit**	**142.530.000**					**36 unit**	**142.530.000**	**100,00%**	**60,40%**	**36 unit**	**142.530.000**	**33,33%**	**21,15%**	**DPRKPP**	**Tidak Komulatif**
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang di sediakan	90 unit	157.000.000	4 unit	100.500.000	30 unit	60.367.700	0 unit	-	30 unit	58.380.000					30 unit	58.380.000	100,00%	96,71%	30 unit	58.380.000	33,33%	37,18%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 unit	517.000.000	16 Unit	116.770.000	6 unit	175.599.500	0 unit	-	6 unit	84.150.000					6 unit	84.150.000	100,00%	47,92%	6 unit	84.150.000	33,33%	16,28%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36 laporan**	**262.000.000**	**12 laporan**	**118.168.279**	**12 laporan**	**150.400.000**	**3 laporan**	**21.601.902**	**3 laporan**	**35.459.446**					**6 laporan**	**57.061.348**	**50,00%**	**37,94%**	**6 laporan**	**57.061.348**	**16,67%**	**21,78%**	**DPRKPP**	**Komulatif**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	262.000.000	12 laporan	118.168.279	12 laporan	150.400.000	3 laporan	21.601.902	3 laporan	35.459.446					6 laporan	57.061.348	50,00%	37,94%	6 laporan	57.061.348	16,67%	21,78%	DPRKPP	komulatif
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah yang terpelihara**	**69 unit**	**1.722.329.882**	**9 unit**	**576.320.212**	**23 unit**	**608.461.800**	**5 unit**	**49.153.274**	**5 unit**	**53.323.087**					**10 unit**	**102.476.361**	**21,74%**	**16,84%**	**10 unit**	**102.476.361**	**14,49%**	**5,95%**	**DPRKPP**	**Komulatif**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraann Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	345.329.882	1 unit	80.333.708	1 unit	121.236.000	1 unit	14.494.500	1 unit	8.439.000					1 unit	22.933.500	100,00%	18,92%	1 unit	22.933.500	66,67%	6,64%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 unit	652.000.000	9 unit	193.702.504	15 unit	240.375.800	3 unit	29.848.774	3 unit	39.024.087					6 unit	68.872.861	40,00%	28,65%	6 unit	68.872.861	13,33%	10,56%	DPRKPP	komulatif
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	118.000.000	4 unit	52.705.000	5 unit	46.850.000	1 unit	4.810.000	1 unit	5.860.000					2 unit	10.670.000	40,00%	22,77%	2 unit	10.670.000	13,33%	9,04%	DPRKPP	Komulatif
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	607.000.000	2 unit	249.579.000	2 unit	200.000.000	0 unit	-	0 unit	-					0 unit	0	0,00%	0,00%	0 unit	0	0,00%	0,00%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Persentase backlog rumah**	**7%**	**8.940.000.000**	**91,52%**	**2.057.587.585**	**8%**	**2.147.245.750**	**0,06%**	**16.752.261**	**0,12%**	**31.875.675**					**0,18%**	**48.627.936**	**2,26%**	**2,26%**	**0,18%**	**48.627.936**	**2,59%**	**0,54%**	**DPRKPP**	**Komulatif**
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota**	**5 dokumen**	**450.000.000**	**1 dokumen**	**178.897.865**	**2 dokumen**	**250.000.000**	**0 dokumen**	**5.293.000**	**1 dokumen**	**2.225.000**					**1 dokumen**	**7.518.000**	**50,00%**	**3,01%**	**1 dokumen**	**7.518.000**	**20,00%**	**1,67%**	**DPRKPP**	**tidak Komulatif**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Catatan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13 = 12/7		14 = 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang terkena bencana Kabupaten/kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah	3 dokumen	150.000.000	1 dokumen	111.397.865	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	5.293.000	1 dokumen	2.225.000					1 dokumen	7.518.000	0,00%	15,04%	1 dokumen	7.518.000	33,33%	5,01%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 dokumen	300.000.000			1 dokumen	100.000.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-					0 dokumen	-	0,00%	0,00%	0 dokumen		0,00%	0,00%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						1 dokumen	100.000.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-					0 dokumen	-	0,00%	0,00%	0 dokumen	-	0,00%	0,00%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah rumah beserta PSU Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dibangun dan direhabilitasi**	**534 unit rumah**	**6.040.000.000**	**95 Unit rumah**	**1.756.491.660**	**150 unit rumah**	**1.197.245.750**	0 unit rumah	**2.067.000**	0 unit rumah	**8.000.000**					0 unit rumah	**10.067.000**	**0,00%**	**0,84%**	0 unit rumah	**10.067.000**	**0,00%**	**0,17%**	**DPRKPP**	**Tidak Komulatif**
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	150 unit	900.000.000	0	-	25 unit rumah	200.000.000	0 unit	-	0 unit	-		-		-	0 unit	-	0,00%	0,00%	0 unit	-	0,00%	0,00%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi korban bencana	19 unit	600.000.000	0	-	5 unit rumah	150.000.000	0 unit rumah	-	0 unit rumah	-					0 unit rumah	-	0,00%	0,00%	0 unit rumah		0,00%	0,00%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah pada lokasi relokasi program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	65 unit	652.000.000	20 unit rumah	214.332.300	20 unit rumah	200.000.000	0 unit	2.067.000	0 unit	8.000.000					0 unit	10.067.000	0,00%	5,03%	0 unit	10.067.000	0,00%	1,54%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	300 unit	3.888.000.000	75 unit rumah	1.542.159.360	60 unit rumah	647.245.750	0 unit rumah	-	0 unit rumah	-		-		-	0 unit rumah	-	0,00%	0,00%	0 unit rumah	-	0,00%	0,00%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**Jumlah dokumen Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**3 dokumen**	**150.000.000**	**0**	-	**1 laporan**	**50.000.000**	**0 Laporan**	**1.000.000**	**0 Laporan**	**600.000**					**0 Laporan**	**1.600.000**	**0,00%**	**3,20%**	**0 Laporan**	**1.600.000**	**0,00%**	**1,07%**	**DPRKPP**	**Tidak Komulatif**
		Penatausahaan Pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	3 dokumen	150.000.000	0	-	1 dokumen	50.000.000	0 Laporan	1.000.000	0 Laporan	600.000					0 Laporan	1.600.000	0,00%	3,20%	0 Laporan	1.600.000	0,00%	1,07%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	**Jumlah rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan**	**30 dokumen**	**1.700.000.000**	**2 dokumen**	**96.278.795**	**10 dokumen**	**500.000.000**	**0 dokumen**	**1.125.000**	**0 dokumen**	**8.584.400**					**0 dokumen**	**9.709.400**	**0,00%**	**1,94%**	**0 dokumen**	**9.709.400**	**0,00%**	**0,57%**	**DPRKPP**	**Tidak Komulatif**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Catatan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13 = 12/7		14 = 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	30 dokumen	300.000.000	6 dokumen	50.600.155	10 dokumen	100.000.000	0 dokumen	1.125.000	0 dokumen	8.584.400					0 dokumen	9.709.400	0,00%	9,71%	0 dokumen	9.709.400	0,00%	3,24%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3 laporan	1.400.000.000	1 laporan	45.678.640	1 laporan	400.000.000	0 laporan	-	0 laporan	-					0 laporan	-	0,00%	0,00%	0 laporan	-	0,00%	0,00%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	**Jumlah Laporan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)**	**3 laporan**	**600.000.000**	**1 laporan**	**28.700.420**	**1 laporan**	**150.000.000**	**0 laporan**	**7.267.261**	**0 laporan**	**12.466.275**					**0 laporan**	**19.733.536**	**0,00%**	**13,16%**	**0 laporan**	**19.733.536**	**0,00%**	**3,29%**	**DPRKPP**	**Tidak Komulatif**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	3 laporan	600.000.000	1 laporan	28.700.420	1 laporan	150.000.000	0 laporan	7.267.261	0 laporan	12.466.275					0 laporan	19.733.536	0,00%	13,16%	0 laporan	19.733.536	0,00%	3,29%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditingkatkan**	**42,33%**	**16.506.000.000**	**96,36%**	**9.386.905.570**	**14,11%**	**5.952.000.000**	**0,02%**	**8.928.800**	**3,50%**	**1.477.069.680**					**3,52%**	**1.485.998.480**	**24,97%**	**24,97%**	**3,52%**	**1.485.998.480**	**8,32%**	**9,00%**	**DPRKPP**	**Komulatif**
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	**Jumlah Laporan Hasil Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**		-	**1 dokumen**	**11.879.220**	**1 Dokumen 1 Laporan**	**15.215.700**	**1 laporan**	**1.541.200**	**1 laporan**	**645.550**					**1 laporan**	**2.186.750**	**0,00%**	**14,37%**	**1 laporan**	**2.186.750**	**100,00%**	**0,00%**	**DPRKPP**	**Tidak Komulatif**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	0	-			1 laporan	15.215.700	0 laporan	1.541.200	0 laporan	645.550					0 laporan	2.186.750	0,00%	14,37%	0 laporan	2.186.750	0,00%	0,00%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Jumlah dokumen hasil Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		-		-	**1 dokumen**	**435.000.000**	**1 dokumen**	**3.358.600**	**1 dokumen**	**7.165.000**					**1 dokumen**	**10.523.600**	**0,00%**	**2,42%**	**1 dokumen**	**10.523.600**	**100,00%**	**2,42%**	**DPRKPP**	**Tidak Komulatif**
		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi		-			3 dokumen	435.000.000	3 dokumen	3.358.600	3 dokumen	7.165.000					3 dokumen	10.523.600	0,00%	2,42%	3 dokumen	10.523.600	100,00%	2,42%	DPRKPP	Tidak Komulatif

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Catatan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13 = 12/7		14 = 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Jumlah Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan**	**30 lokasi**	**16.506.000.000**	**96,42%**	**9.375.026.350**	**30 lokasi**	**5.501.784.300**	**0 lokasi**	**4.029.000**	**0 lokasi**	**1.469.259.130**					**0 lokasi**	**1.473.288.130**	**0,00%**	**26,78%**	**0 lokasi**	**1.473.288.130**	**0,00%**	**8,93%**	**DPRKPP**	**Tidak Komulatif**
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	150 unit rumah	3.150.000.000	43 unit rumah	752.500.000	50 unit rumah	1.072.500.000	0 unit rumah	2.529.000	47 Unit	954.276.250					47 Unit	956.805.250	0,00%	89,21%	47 Unit	956.805.250	31,33%	**30,37%**	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	45 unit rumah	1.417.500.000			15 unit	450.000.000	0 unit	-	14 Unit	420.000.000					14 Unit	420.000.000	0,00%	93,33%	14 Unit	420.000.000	31,11%	29,63%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	66 Ha	11.938.500.000	40 Ha	8.565.215.900	22 Ha	3.979.284.300	0 Ha	1.500.000	26 Ha	94.982.880					26 Ha	96.482.880	0,00%	2,42%	26 Ha	96.482.880	39,39%	0,81%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**Persentase Unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha**	**12,49%**	**28.350.000.000**	**93,56%**	**5.082.899.207**	**6,73%**	**7.560.000.000**	**0,01%**	**14.773.522**	**3,03%**	**3.409.280.250**					**3,05%**	**3.424.053.772**	**45,29%**	**45,29%**	**3,05%**	**3.424.053.772**	**24,40%**	**12,08%**	**DPRKPP**	**Komulatif**
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah	**Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha**	**1350 unit rumah**	**28.350.000.000**	**268 unit rumah**	**5.082.899.207**	**450 unit rumah**	**7.560.000.000**	**0 unit rumah**	**14.773.522**	**167 unit rumah**	**3.409.280.250**					**167 unit rumah**	**3.424.053.772**	**0,00%**	**45,29%**	**167 unit rumah**	**3.424.053.772**	**12,37%**	**12,08%**	**DPRKPP**	**Tidak Komulatif**
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1350 unit rumah	28.350.000.000	268 unit rumah	5.082.899.207	450 unit rumah	7.560.000.000	0 unit rumah	14.773.522	167 Unit Rumah	3.409.280.250					167 unit rumah	3.424.053.772	0,00%	45,29%	167 unit rumah	3.424.053.772	12,37%	12,08%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU**	**15%**	**14.436.000.000**	**95,02%**	**3.403.515.548**	**5%**	**3.660.821.200**	**0,01%**	**9.617.261**	**0,33%**	**243.732.675**					**0,35%**	**253.349.936**	**6,92%**	**6,92%**	**0,35%**	**253.349.936**	**2,31%**	**1,75%**	**DPRKPP**	**Komulatif**
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Jumlah lokasi perumahan yang terfasilitasi PSU**	**20 lokasi**	**14.436.000.000**	**8 Lokasi**	**3.403.515.548**	**20 lokasi**	**3.660.821.200**	**0 lokasi**	**9.617.261**	**1 lokasi**	**243.732.675**					**1 lokasi**	**253.349.936**	**0,00%**	**6,92%**	**1 lokasi**	**253.349.936**	**5,00%**	**1,75%**	**DPRKPP**	**Komulatif**
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	3 dokumen	360.000.000	1 Dokumen	74.720.870	1 dokumen	120.000.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-					0 dokumen	-	0,00%	0,00%	0 dokumen	-	0,00%	0,00%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	20 lokasi	13.176.000.000	13 Lokasi	3.147.740.060	20 lokasi	3.235.821.200	0 lokasi	-	1 lokasi	227.006.400					1 lokasi	227.006.400	0,00%	7,02%	1 lokasi	227.006.400	5,00%	1,72%	DPRKPP	Komulatif

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Catatan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13 = 12/7		14 = 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	3 laporan	450.000.000	1 laporan	112.952.589	1 laporan	150.000.000	0 laporan	8.717.261	1 laporan	13.135.275					1 laporan	21.852.536	0,00%	14,57%	1 laporan	21.852.536	33,33%	4,86%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	15 laporan	450.000.000	5 laporan	68.102.029	5 laporan	155.000.000	0 laporan	900.000		3.591.000					0 laporan	4.491.000	0,00%	2,90%	0 laporan	4.491.000	0,00%	1,00%	DPRKPP	Tidak Komulatif
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																													
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**Persentase Permasalahan pertanahan yang difasilitasi**	**300%**	**2.720.000.000**	**71,33%**	**4.049.725.891**	**100%**	**650.000.000**	**3,02%**	**19.649.332**	**7,22%**	**46.927.621**					**10,24%**	**66.576.953**	**10,24%**	**10,24%**	**0,102**	**66.576.953**	**3,41%**	**2,45%**	**DPRKPP**	**Komulatif**
		Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota**	**3 dokumen**	**2.720.000.000**	**2 Dokumen**	**4.049.725.891**	**1 dokumen**	**650.000.000**	**0 dokumen**	**19.649.332**	**1 dokumen**	**46.927.621**					**1 dokumen**	**66.576.953**	**100,00%**	**10,24%**	**1 dokumen**	**66.576.953**	**33,33%**	**2,45%**	**DPRKPP**	**Tidak Komulatif**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 laporan	2.420.000.000	1 laporan	3.909.865.741	1 laporan	570.000.000	0 laporan	19.649.332	1 laporan	24.358.861					1 laporan	44.008.193	100,00%	7,72%	1 laporan	44.008.193	33,33%	1,82%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten	3 dokumen	300.000.000	1 Dokumen	139.860.150	1 dokumen	80.000.000	0 dokumen	-	1 laporan	22.568.760					1 laporan	22.568.760	100,00%	28,21%	1 laporan	22.568.760	33,33%	7,52%	DPRKPP	Tidak Komulatif
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		**30,32%**	**20,45%**	**DINAS PRKPP**					
																		Predikat kinerja		Sangat Rendah		**DINAS PRKPP**					

Catatan : *)

Faktor Pendrong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :

Paraf Hierarkis			
No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Dinas / Badan		
2.	Kasubbag		14/6/24

Disusun
Nganjuk, 14 Juni 2024
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Nganjuk

AGUS FRIHANNEDY,S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640901 198703 1 013